



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.
3. Bupati adalah Bupati Batang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
9. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang dilaksanakan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## **BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA**

### **Pasal 3**

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Utama Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.

#### Pasal 4

Indikator Kinerja Utama digunakan oleh Perangkat Daerah untuk:

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 5

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Batang.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.

### BAB V PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 3 April 2018

BUPATI BATANG.

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 3 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 17.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR 17 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 BATANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

No	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Formula	Penanggungjawab
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, transparan, dan partisipatif	1	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)					Indeks yang didapat dari survey kepuasan masyarakat (SKM)	SETDA
				1	Meningkatnya pelayanan publik bagi masyarakat Batang	1	Persentase OPD yang telah memiliki SPP dan SOP	Jumlah OPD yang telah memiliki SPP dan SOP dibagi jumlah OPD dikalikan 100%	SETDA
						2	Persentase PD yang telah memiliki website aktif	Jumlah PD yang telah memiliki website aktif dibagi jumlah PD yang telah memiliki website dikalikan 100%	DISKOMINFO
2.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ) dan menerapkan prinsip-	1	Indeks Profesionalitas ASN					Cukup jelas	BKD
		2	Skor LAKIP/ LKJIP					Nilai yang didapatkan dari Kemenpan RB	SETDA

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Penanggungjawab	
	prinsip reformasi birokrasi		1 Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1	Opini BPK	Predikat yang didapatkan dari BPK RI atas laporan keuangan	INSPEKTORAT
				2	Skor PeGi (Pemeringkatan <i>E-Government</i> )	Sudah jelas	DISKOMINFO
				3	Smart City /Smart Village	Sudah jelas	DISKOMINFO
				4	Nilai PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	Nilai yang didapat dari kemenpan RB	INSPEKTORAT
				5	Presentase ASN yang mengikuti diklat	Jumlah ASN yang mengikuti diklat dibagi jumlah ASN dikalikan 100%	BKD
3	Meningkatkan perencanaan yang aspiratif dan sinergitas dan kerjasama pembangunan daerah	1	Persentase OPD inovatif			Jumlah OPD inovatif dibagi jumlah OPD yang ada dikalikan 100%	BAPELITBANG
				1	Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan	1	Persentase kesesuaian perencanaan dengan penganggaran
				2	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	Sudah jelas	BAPELITBANG

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Penanggungjawab		
				3	Persentase peningkatan PAD	$\text{PAD tahun (n-1)} - \text{dikurangi PAD tahun N} / \text{dibagi PAD Tahun N} \times 100\%$	BPKPAD	
			2	Meningkatnya sinergitas dan kerjasama antar daerah (KAD)	Persentase OPD yang melakukan KAD	Jumlah OPD yang melakukan KAD dibagi jumlah OPD yang ada dibagi 100%	SETDA	
4.	Meningkatkan pembangunan manusia Batang seutuhnya	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Nilai maksimum dan minimum komponen IPM	BAPELITBANG	
			1	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang paripurna secara holistik	1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas disuatu wilayah tertentu selama 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup disuatu wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama dikalikan 100.000	DINKES
					2	Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah kematian bayi (umur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu dibagi kelahiran hidup pada satu tahun tertentu dikalikan 1000	DINKES
					3	Angka Kematian Balita (AKBA)	Jumlah kematian balita (umur kurang 5 tahun)	DINKES

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Penanggungjawab		
					pada satu tahun tertentu dibagi kelahiran hidup pada satu tahun tertentu dikalikan 1000			
				4	Prevalensi Balita Gizi Buruk	Banyaknya balita gizi buruk dibagi jumlah balita dikalikan 100%	DINKES	
			2	Meningkatnya pelayanan aksesibilitas dan kualitas serta daya saing pendidikan bagi seluruh penduduk Batang	1	Rata-rata lama sekolah	Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi jumlah seluruh tahun pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas dikalikan 100%	DISDIKBUD
				2	Persentase Guru berkualifikasi ijazah S1/ D4	Jumlah guru berkualifikasi ijazah S1/D4 dibagi jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA, SMK, MA dikalikan 100%	DISDIKBUD	
5.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkeadilan gender serta pengendalian penduduk	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Cukup jelas	DP3AP2KB	
		2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Cukup jelas	DP3AP2KB	
			1	Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas	1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berprestasi	jumlah LPM berprestasi	DP3AP2KB



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Penanggungjawab		
			hidup perempuan dan pemenuhan hak anak	2	Persentase perempuan di lembaga legislatif	Jumlah perempuan di lembaga legislatif dibagi jumlah pekerja perempuan dikalikan 100%	DP3AP2KB	
				3	Kecamatan ramah anak	Jumlah kecamatan yang sudah memenuhi kriteria kecamatan ramah anak di bagi jumlah kecamatan yang ada dikalikan 100%	DP3AP2KB	
			Terwujudnya pengendalian penduduk dan administrasi kependudukan yang menyeluruh	1	Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif	Jumlah pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif dibagi jumlah pasangan usia subur	DP3AP2KB	
				2	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	Jumlah penduduk usia >17 tahun yang berKTP dibagi jumlah penduduk usia >17 atau yang telah menikah	DISDUKCAPIL	
6	Meningkatkan kemampuan pemuda berwirausaha dalam mengelola potensi lokal serta pengembangan industri kreatif	1	Persentase pemuda berwirausaha			Jumlah pemuda berwirausaha dibagi jumlah pemuda dikalikan 100 %	DISPERINDAGKOP DAN UKM	
			1	Meningkatnya kecakapan dan kemandirian pemuda dalam berwirausaha	1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Jumlah organisasi pemuda yang aktif dibagi jumlah seluruh organisasi pemuda dikalikan 100%	DISPARPORA

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Penanggungjawab	
			2 Meningkatkan akses permodalan, kualitas, dan daya saing koperasi dan UMKM	1 Persentase koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif dibagi jumlah seluruh koperasi dikalikan 100%	DISPERINDAGKOP DAN UKM	
7	Membuka peluang investasi dengan mempromosikan ketersediaan lahan, energi dan tenaga kerja untuk industri dan manufaktur	1	Pertumbuhan Ekonomi			Cukup jelas	BAPELITBANG
		2	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)			Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja dibagi jumlah penduduk angkatan kerja dikalikan 100%	DPMPTSP DAN NAKER
		1	Meningkatnya jumlah nilai investasi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat Batang	1	Jumlah realisasi nilai investasi	Jumlah realisasi nilai investasi	DPMPTSP
				2	Rasio daya serap tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dibagi jumlah seluruh PMA/PMDN	DISNAKER
				3	Pertumbuhan industri	Jumlah industri tahun N dikurangi jumlah industri tahun N-1 dibagi jumlah industri sampai dengan tahun N dikalikan 100%	DISPERINDAGKOP DAN UKM
4	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB ADHB			Jumlah sektor perindustrian dibagi jumlah PDRB ADHB dikalikan 100%	DISPERINDAGKOP DAN UKM		
8	Meningkatkan pemerataan dan kualitas	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH)		Cukup jelas	DLH	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Penanggungjawab		
	pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan		1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan antar wilayah	1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/Jam)	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut dikalikan 100%	DPU PR
					2	Rasio ijin trayek	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dibagi jumlah penduduk dikalikan 100%	DISHUB
			2	Meningkatnya pengelolaan ruang terbuka hijau, penyediaan air baku dan penanggulangan masalah rob dan abrasi dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	1	Rasio ruang terbuka hijau	Jumlah kawasan lindung dibagi jumlah ruang terbuka hijau	DLH
					2	Persentase penanganan sampah	Jumlah sampah yang ditangani dibagi jumlah seluruh sampah dikalikan 100%	DLH
					3	Pemantauan status mutu air	Cukup jelas	DLH
					4	Uji Sampel Kualitas air sungai	Cukup jelas	DLH
					5	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi luas irigasi kabupaten dikalikan 100%	DPUPR
9	Mengembangkan dan mengintegrasikan	1	Nilai Tukar Petani (NTP)		Indeks yang diterima petani (It) dibagi indeks	DISPAPERTA		

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Penanggungjawab	
	agrobisnis dan agrowisata serta pengembangan kawasan perdagangan di wilayah Batang				yang dibayar petani (lb) dikalikan 100		
		1	Meningkatnya produktivitas pangan dan pertanian serta kawasan perdagangan	1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	Jumlah kontribusi sektor pertanian dibagi jumlah PDRB ADHB sektor pertanian dikalikan 100%	DISPAPERTA
				2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah	Cukup jelas	DISPAPERTA
				3	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dibagi jumlah PDRB ADHB dikalikan 100%	DISPERINDAGKOP DAN UKM
10	Pengembangan dan revitalisasi pariwisata dan kawasan pesisir serta mendorong produktivitas perikanan dan kelautan yang lestari	1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata dibagi jumlah PDRB ADHB dikalikan 100%	DISPARPORA	
		1	Berkembangnya obyek pariwisata unggulan dan destinasi wisata baru kawasan pesisir	1	Peningkatan jumlah wisatawan	Cukup jelas	DISPARPORA
		2	Meningkatnya produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya yang lestari	1	Produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap tahun N	DISLUTKANAK
				2	Produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya tahun N	DISLUTKANAK

No	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Formula	Penanggungjawab
11	Membangkitkan kembali sistem keamanan lingkungan yang terintegrasi dalam bentuk sistem peringatan dini dan pengamalan nilai agama dan budaya	1	Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk					Jumlah Linmas dibagi jumlah penduduk dikali 10.000	SATPOL PP
				1	Terciptanya keamanan lingkungan dan <i>early warning system</i> penanggulangan kriminalitas	1	Rasio pos siskamling per jumlah desa/ kelurahan	Jumlah pos siskamling dibagi jumlah desa/ kelurahan	SATPOL PP
			2			Persentase ketersediaan peta resiko bencana	Cukup jelas	BPBD	
12	Meningkatkan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur serta penanggulangan masalah sosial yang terpadu dan menyeluruh	1	PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos					Jumlah PSKS yang aktif	DINSOS
				1	Meningkatnya integritas nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangan karakter masyarakat	1	Jumlah grup kesenian yang dibina	Jumlah grup kesenian yang dibina	DISPARPORA
			2			Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berhasil	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berhasil	DINSOS	

BUPATI BATANG.

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR 17 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN BATANG

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	sumberdata	Penanggung jawab	
1		2	3	4	6	7	
<i>Sekretariat Daerah</i>							
1.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kab. Batang	1	Meningkatnya Nilai Evaluasi LKjIP Kab	Hasil penilaian dari Kemenpan RB terhadap AKIP Kabupaten	Bagian Organisasi	setda
			2	Meningkatnya Nilai Evaluasi LKjIP Setda	Skor LKjIP tahun N	Bagian organisasi	setda
			3	Ketepatan Waktu Penyusunan LPPD dan LPPD AMJ , LKPJ dan LKPJ AMJ serta Memori Bupati	Ada/ tidak dokumen	Bagian Pemerintahan	setda
			4	Presentase Lelang Melalui <i>e-procurement</i>	Jumlah paket yang dilelang dibagi jumlah total paket lelang dikalikan 100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	setda
2.		Meningkatnya Kompetensi Aparatur Sipil Negara	1	Jumlah kegiatan Bimtek bagi ASN dalam organisasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Kegiatan bintek bagi ASN dalam organisasi pengadaan Barang/ Jasa	Bagian Pengendalian Pembangunan	setda
			2	Tersusunnya analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan di OPD	Jumlah OPD yang sudah menyusun dokumen anjab, ABK,dan evajab	Bagian Organisasi	setda
			3	Meningkatnya kompetensi Aparatur	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti forkompanda	Bagian Organisasi	Setda
3.		Meningkatnya Penyerapan Anggaran	1	Persentase penyelesaian pekerjaan yang tepat waktu	Jumlah paket pekerjaan selesai tepat waktu dibagi jumlah	Bagian Pengendalian	Setda

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	sumberdata	Penanggung jawab	
1		2	3	4	6	7	
				seluruh paket pekerjaan dikalikan 100%	Pembangunan		
			2	Jumlah tenaga terampil kontruksi yang bersertifikat LPJK	Tenaga terampil kontruksi yang lulus sertifikat SKT LPJK tahun berkenaan	Bagian Pengendalian Pembangunan	Setda
			3	Persentase monitoring pelaksanaan pekerjaan	Julah kegiatan monitoring paket pekerjaan dibagi jumlah seluruh paket pekerjaan dikalikan 100%	Bagian Pengendalian Pembangunan	Setda
			2	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ada/tidak ada	Bagian Umum	Setda
			3	Presentase capaian kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase capaian kegiatan pelayanan administrasi perkantoran tahun N	Bagian Umum	Setda
4.		Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan aparatur	1	Terlaksananya pelaksanaan pelayanan masyarakat terpadu di kecamatan	Jumlah kecamatan yang melaksanakan PATEN tahun N	Bagian Pemerintahan	Setda
			2	Terlaksananya peringatan HUT kemerdekaan RI, hari jadi Kabupaten Batang, dan pelantikan kepala desa terpilih	Jumlah kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI, hari jadi Kabupaten Batang, dan pelantikan kepala desa terpilih	Bagian Pemerintahan	Setda
			3	nilai IKM Setda	Nilai IKM setda tahun N	Bagian Organisasi	Setda
			4	Tersusunnya Roadmap RB dan renstra Setda	Ada/ tidak	Bagian Organisasi	Setda
			5	Presentase OPD yang telah melaksanakan SOP	Perangkat daerah yang sudah melaksanakan SOP dibagi jumlah perangkat daerah dikalikan 100%	Bagian Organisasi	Setda
			6	Presentase jumlah aduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang tertangani	Jumlah aduan yang ditangani dibagi jumlah aduan yang masuk dikalikan 100%	Bagian Organisasi	Setda

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3		4	6	7
			7	Presentase penerima hibah yang melengkapi persyaratan pencairan	Jumlah penerima hibah yang memenuhi persyaratan dibagi jumlah pengajuan hibah dikalikan 100%	Bagian Kesra	Setda
			8	Presentase penerima hibah tepat sasaran	Jumlah penerima hibah yang tepat sasaran dibagi jumlah pengajuan hibah dikalikan 100%	Bagian Kesra	Setda
			9	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor hasil pengadaan tahun N	Bagian Umum	Setda
5.		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi ( <i>e-Government</i> )	1	Persentase publikasi kegiatan pemerintah Kab. Batang	Jumlah kegiatan pemerintahan yang diliput/diberitakan	Bagian Humas	Setda
			2	Persentase dokumentasi kegiatan pemerintah Kab. Batang	Jumlah kegiatan yang didokumentasikan foto dan video dibagi jumlah kegiatan yang diliput	Bagian Humas	Setda
			3	Jumlah pertemuan kegiatan kehumasan dengan OPD dan media massa	Jumlah pertemuan bakohumas dan media gatering	Bagian Humas	Setda
			4	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan kegiatan tepat waktu	Jumlah perangkat daerah yang laporan kegiatan tepat waktu dibagi jumlah seluruh PD dikalikan 100%	Bagian Pengendalian Pembangunan	Setda
			5	Persentase perangkat daerah yang lengkap dokumen pengadaan barang/jasa	Jumlah pengajuan kelengkapan dokumen pengadaan dibagi jumlah surat keterangan yang terbit dikalikan 100%	Bagian Pengendalian Pembangunan	Setda
6.		Tersusunnya Peraturan Perundang Undangan dan Kebijakan Umum Strategis yang melibatkan stakeholder	1	Presentase jumlah Raperda yang telah diharmonisasi sesuai usulan dalam propemperda	Jumlah raperda yang telah diharmonisasi dibagi jumlah target raperda yang telah diharmonisasi sesuai renja dikali 100%	Bagian Hukum	Setda
			2	Presentase jumlah Raperbup	Jumlah raperbup yang telah	Bagian Hukum	Setda



NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3	4	6	7
			yang telah diharmonisasi sesuai usulan dalam propemperda	diharmonisasi dibagi jumlah target raperbup yang telah diharmonisasi sesuai renja dikali 100%		
			3 Presentase jumlah rancangan Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati yang telah diharmonisasi sesuai pengajuan dari OPD	Jumlah rancangan SK yang telah diharmonisasi dibagi jumlah target rancangan yang telah di harmonisasi sesuai pengajuan dari OPD dikali 100%	Bagian Hukum	Setda
			4 Presentase jumlah perkara hukum yang dapat diselesaikan berdasarkan gugatan perdata dan TUN yang masuk	Jumlah perkara hukum yang dapat diselesaikan dibagi jumlah perkara hukum yang masuk dikalikan 100%	Bagian Hukum	Setda
			5 Presentase jumlah kajian hukum yang dapat diselesaikan berdasarkan permasalahan hukum yang ada dan atau pengajuan kajian hukum dari OPD	Jumlah kajian hukum yang dapat diselesaikan dibagi jumlah pengajuan kajian dikali 100%	Bagian Hukum	Setda
			6 Presentase jumlah masyarakat yang memperoleh sosialisasi / penyuluhan hukum peraturan perundang-undangan berdasarkan RENJA	Jumlah masyarakat yang menghadiri sosialisasi /penyuluhan hukum dibagi jumlah target masyarakat yang menghadiri sosialisasi/ penyuluhan hukum sesuai renja dikali 100%	Bagian Hukum	Setda
			7 Presentase jumlah rakor dan pembinaan SJDI berdasarkan RENJA	Jumlah rakor dan pembinaan SJDI yang telah dilaksanakan dibagi target rakor dan pembinaan SJDI sesuai renja dikalikan 100%	Bagian Hukum	Setda
			8 Presentase jumlah anggota Panpel RANHAM yang	Jumlah anggota panpel RANHAM yang mengikuti	Bagian Hukum	Setda

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3	4	6	7
			mengikuti rakor HAM	rakor HAM dibagi target jumlah anggota panpel RANHAM yang mengikuti rakor HAM sesuai renja dikalikan 100%		
			9 Presentase jumlah produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lain yang tersebarluaskan brdasarkan RENJA	jumlah produk hukum daerah dan per UUan yang disebarluaskan dibagi target produk hukum daerah dan per UUan yang disebarluaskan sesuai renja dikalikan 100%	Bagian Hukum	Setda
			10 Presentase masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum	Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum dibagi jumlah target masyarakat yang mendpat layanan bantuan hukum yang ada dikalikan 100%	Bagian Hukum	Setda
7		Terbentuknya mental aparatur dalam mendukung budaya kerja	terbentuknya Kelompok Budaya Kerja dan Gugus Kendali Mutu di setiap OPD	Jumlah OPD yang membentuk KBK dan GKM	Bagian Organisasi	Setda
8		Terselenggaranya Koordinasi Kinerja secara Efektif	1 Fasilitasi koordinasi pengembangan dunia usaha	Jumlah koordinasi pengembangan dunia usaha	Bag. Perekonomian	Setda
			2 Produktifitas dan kemandirian melalui usaha UMKM	Jumlah UMKM yang mampu bersaing dan mandiri	Bagian Perekonomian	Setda
			3 Partisipasi UMKM yang mengikuti pameran	Jumlah UMKM yang mengikuti pameran	Bagian Perekonomian	Setda
			3 Jumlah perjalanan dinas Bupati dan wakil Bupati dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas Bupati dan Wabup	Bagian Umum	Setda
9		Terselenggaranya Kerjasama dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya dan Stakeholder	1 Fasilitasi koodinasi peningkatan produksi, terpenuhinya sarana produksi bagi petani	Jumlah koordinasi terkait produksi pertanian	Bagian Perekonomian	Setda
			2 Fasilitasi UMKM untuk mendapatkan KUR	Jumlah UMKM yang mendapatkan KUR dibagi seluruh UMKM yang terdata di SIKP dikalikan 100%	Bagian Perekonomian	Setda

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3		4	6	7
			3	Deviden yang disetorkan ke kab. Batang	Jumlah deviden yang disetor	Bagian Perekonomian	Setda
			4	Data sarana ibadah Kab. Batang	Jumlah sarana ibadah di Kab. Batang	Bagian Kesra	Setda
			5	Jumlah jemaah haji yang terfasilitasi	Jumlah jemaah haji yang terfasilitasi	Bagian Kesra	Setda
			6	Jumlah TPHD / TKHD yang tersedia sesuai perhitungan kuota haji	Jumlah TPHD/TKHD	Bagian Kesra	Setda
			7	Jumlah Kholifah qori, hafiz, dan mufasir	Jumlah Kholifah qori, hafiz, dan mufasir	Bagian Kesra	Setda
			8	Jumlah penyelenggaraan tarling di 15 kecamatan	Jumlah penyelenggaraan tarling di 15 kecamatan	Bagian Kesra	Setda
			9	Jumlah penyelenggaraan peringatan hari besar nasional	Jumlah penyelenggaraan peringatan hari besar nasional	Bagian Kesra	Setda
			10	Jumlah pelaksanaan kerjasama / kesepakatan bersama lingkup dalam negeri, luar negeri, dan pihak ke 3	Jumlah pelaksanaan kerjasama / kesepakatan bersama lingkup dalam negeri, luar negeri, dan pihak ke 3	Bagian Humas	Setda
			11	Jumlah perjalanan dinas Bupati dan wakil Bupati ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas Bupati dan wakil Bupati ke luar daerah	Bagian Umum	Setda
<i>Sekretariat DPRD</i>							
1		Terwujudnya SDM aparatur yang profesional	1	Pegawai yang mengikuti pelatihan / workshop dst	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/ workshop	Bagian Administrasi Kesekretariatan	<i>Sekretariat DPRD</i>
			2	Bintek / workshop yang diselenggarakan untuk SDM Setwan	Jumlah bintek/ workshop untuk SDM Setwan	Bagian Administrasi Kesekretariatan	<i>Sekretariat DPRD</i>
2		Terwujudnya SDM legislatif yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya	1	Anggota DPRD yang mengikuti pelatihan/ workshop	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti pelatihan/ workshop	Bagian Legislasi	<i>Sekretariat DPRD</i>
			2	Bintek/workshop yang diselenggarakan untuk SDM	Jumlah Bintek/workshop yang diselenggarakan untuk SDM	Bagian Legislasi	<i>Sekretariat DPRD</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	sumberdata	Penanggung jawab	
1		2	3	4	6	7	
			DPRD	DPRD			
3		Terwujudnya pelayanan administrasi yang tertib dan memuaskan	1	Prosentase laporan/ risalah rapat yang dibuat	Laporan/ Risalah yang dibuat dibagi jumlah laporan dikali 100%	Bagian Legislasi	<i>Sekretariat DPRD</i>
	2		Laporan yang dikirim tepat waktu	Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu	Bagian Legislasi	<i>Sekretariat DPRD</i>	
	3		Aduan yang ditindaklanjuti Sekwan untuk diajukan/ ditinaklanjuti pada Pimpinan DPRD	Jumlah aduan yang ditindaklanjuti	Bagian Legislasi	<i>Sekretariat DPRD</i>	
4		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang representatif		Prosentase sarana prasarana kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana kondisi baik di bagi jumlah sarana prasarana yang ada dikalikan 100%	Bagian Administrasi Kesekretariatan	<i>Sekretariat DPRD</i>
5		Terlaksananya penyelenggaraan rapat-rapat dan sidang DPRD dan penyebarluasan informasi kegiatan DPRD	1	Rapat-rapat yang difasilitasi/diselenggarakan	Jumlah rapat-rapat yang diselenggarakan		<i>Sekretariat DPRD</i>
			2	Penyebarluasan informasi kegiatan DPRD	Jumlah penyebarluasan informasi kegiatan		<i>Sekretariat DPRD</i>
<i>Inspektorat</i>							
1.		Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	1	Penurunan jumlah temuan hasil pengawasan internal dan eksternal	Jumlah temuan tahun berjalan dibagi jumlah pada tahun sebelumnya	Irbanwil I/II/III/IV	<i>Inspektorat</i>
			2	Penurunan jumlah temuan kerugian negara/pemborosan (bersifat finansial)	Jumlah temuan kerugian negara/ pemborosan (bersifat finansial) tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya	Irbanwil I/II/III/IV	<i>Inspektorat</i>
			3	Penurunan jumlah aduan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah aduan tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya	Irbanwil I/II/III/IV	<i>Inspektorat</i>
2.		Meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemda dan OPD		Opini Laporan Keuangan Pemda	Perbandingan opini BPK tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya	Irbanwil I/II/III/IV	<i>Inspektorat</i>
3.		Meningkatnya kualitas LAKIP	1	Nilai hasil evaluasi LAKIP	Jumlah PD yang memiliki nilai	Irbanwil	<i>Inspektorat</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	sumberdata	Penanggung jawab	
1		2	3	4	6	7	
		Pemda dan LAKIP OPD		pemda	evaluasi sangat baik	I/II/III/IV	
			2	Jumlah OPD yang nilai LAKIPnya meningkat dari tahun sebelumnya	Rasio perolehan nilai evaluasi LKjIP PD tahun berjalan dan tahun sebelumnya	Irbanwil I/II/III/IV	
4.		Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan		Prosentase jumlah tindak lanjut tepat waktu	Jumlah temuan tahun berjalan yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan sampai dengan akhir tahun sebelumnya	Irbanwil I/II/III/IV	Inspektorat
5		Meningkatnya kompetensi SDM Pengawasan	1	Prosentase SDM pengawasan yang mengikuti PKS/Bimtek/Diklat	Jumlah SDM pengawasan yang mengikuti PKS/Bimtek/Diklat tahun berjalan dibagi dengan jumlah sampai dengan akhir tahun sebelumnya	Irbanwil I/II/III/IV	Inspektorat
			2	Jumlah SDM bersertifikat auditor	Jumlah SDM bersertifikat auditor tahun berjalan dibagi dengan jumlah sampai dengan akhir tahun sebelumnya	Irbanwil I/II/III/IV	Inspektorat
6		Meningkatnya integritas SDM pengawas		Menurunnya jumlah aduan masyarakat tentang pelanggaran kode etik aparat pengawas	Jumlah aduan dibagi dengan jumlah jumlah aduan sampai dengan akhir tahun sebelumnya	Irbanwil I/II/III/IV	Inspektorat
<i>Disdikbud</i>							
1		Meningkatnya proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1	Rata-Rata Lama Sekolah	Jumla seluruh tahun pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas dikalikan 100%		<i>Disdikbud</i>
			2	Harapan Lama Sekolah	Formule $\rightarrow HLS'_t = FK \times \sum_{i=0}^n \frac{E'_i}{P'_i}$ Keterangan: $HLS'_t$ Harapan Lama Sekolah pada umur $n$ di tahun $t$ $E'_i$ Jumlah penduduk usia $i$ yang bersekolah pada tahun $t$ $P'_i$ Jumlah penduduk usia $i$ pada tahun $t$ $i$ Usia ( $n, n+1, \dots, n$ ) $FK$ Faktor konversi pesertoran		<i>Disdikbud</i>
			3	Angka Melek Huruf Penduduk Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif dapat baca dan tulis dibagi jumlah penduduk usia produktif		<i>Disdikbud</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3	4	6	7
				seluruhnya dikalikan 100%		
2		Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif, responsive dan partisipatif	Prosentase Guru Berkualifikasi Ijazah S1 / D4	Jumlah guru yang berkualifikasi S1/ D4 dibagi jumlah guru yang ada dikalikan 100%	Kabid ketenagaan	Disdikbud
3		Meningkatnya upaya pelestarian kebudayaan daerah melalui penguatan nilai-nilai budaya, sejarah, pengembangan bahasa dan kesenian yang berbasis kearifan lokal	Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan	Jumah festival seni di daerah dibagi jumlah peristiwa budaya yang diselenggarakan Pemda dikalikan 100%	Kabid Kebudayaan	Disdikbud
4		Meningkatnya profesional dan efektifitas kerja aparatur dalam melaksanakan layanan pendidikan dan kebudayaan dengan menguatkan kerjasama dan kemitraan serta pelibatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Nilai SKM terhadap pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Sekretariat	Disdikbud
<i>Satpol PP</i>						
1.		Meningkatkan kualitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1 Jumlah Linmas per Desa / Kelurahan	Jumlah penduduk Kab. Batang dibagi 10.000 penduduk dikalikan target	Kabid Linmas	<i>Satpol PP</i>
			2 Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah pos kampling Kab. Batang dibagi jumlah desa dan kelurahan di Kab. Batang		<i>Satpol PP</i>
2.		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perbup	1 Prosentase jumlah pelanggaran terhadap perda yang diselesaikan dibanding jumlah pelanggaran Perda dan / atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan	Jumlah pelanggaran perda dan atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dibagi jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan kali 100%	Kabid Gakda	<i>Satpol PP</i>
			2 Terlaksananya cakupan patrol siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di	Jumlah regu dikalikan jumlah personil anggota patroli dibagi jumlah kecamatan	Kabid Trantib	<i>Satpol PP</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3	4	6	7
			seluruh kecamatan			
3		Meningkatnya standar kualifikasi petugas pemadam kebakaran	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	Jumlah satgas damkar yang memiliki sertifikat sesuai standar kualifikasi		Satpol PP
4		Meningkatnya cakupan mobil damkar yang layak pakai dalam wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Jumlah mobil pemadam kebakaran 3.000 liter pada wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Jumlah WMK memiliki mobil/mesin damkar layak pakai		Satpol PP
<i>DP3AP2KB</i>						
1.		Terakomodasi kepentingan perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dibagi jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang ada		<i>DP3AP2KB</i>
2.		Peserta KB aktif dan peserta KB baru	1	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	Jumlah peserta KB aktif dibagi jumlah pasangan usia subur	<i>DP3AP2KB</i>
			2	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	Jumlah anak dibagi jumlah keluarga	<i>DP3AP2KB</i>
3.		Menurunnya PUS yang ber-KB tidak terlayani	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terlayani (Unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber -KB tidak terlayani dibagi jumlah PUS		<i>DP3AP2KB</i>
4.		Meningkatnya kesertaan ber-KB bagi anggota kelompok BKB	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Jumlah anggota BKB yang ber -KB dibagi jumlah anggota BKB		<i>DP3AP2KB</i>
5.		Semakin bertambah anggota kelompok UPPKS menjadi peserta KB	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	Jumlah PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber - KB dibagi jumlah PUS anggota UPPKS		<i>DP3AP2KB</i>
6.		Ratio Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB	Ratio penyuluh KB / petugas Lapangan 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 Desa / Kelurahan	Jumlah penyuluh KB/petugas lapangan dibagi Jumlah desa/kelurahan		<i>DP3AP2KB</i>
7.		Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)	Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa / kelurahan	Jumlah PPKBD dibagi jumlah desa/ kelurahan		<i>DP3AP2KB</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3	4	6	7
			1 PPKBD			
8.		Penyediaan dan penyebarluasan data dan informasi kependudukan dan KB berbasis T1	Penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa / kelurahan	Jumlah penyedia data mikro keluarga dibagi desa/ kelurahan		DP3AP2KB
<i>Dinas Pangan dan Pertanian</i>						
1.		Meningkatnya produksi pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	Jumlah produksi produk pertanian tahun N dibandingkan dengan tahun N-1 dikalikan 100%		Dispaperta
2		Meningkatnya ketersediaan pangan utama ( Food Availability)	1 Ketersediaan bahan pangan utama			Dispaperta
			a. beras	Produksi gabah kering panen dikurangi angka susut (benih, pakan, tercecet, susut) dikonversi dengan rendeman beras 62,74%		
			b. jagung	Produksi jagung dikurangi angka susut atau dikalikan dengan angka konversi jagung 89%		
			2 Prosentase penguatan cadangan pangan daerah	Jumlah cadangan pangan kabupaten di bagi standar standar cadangan pangan kabupaten dikali 100%		Dispaperta
			3 Skor pola pangan harapan daerah	Hasil kali dari persen energi dari kelompok pangan dengan bobot		Dispaperta
3.		Meningkatnya jumlah SDM pertanian	Peningkatan kinerja penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang mengikuti pelatihan dibandingkan dengan jumlah penyuluh pertanian yang diikutkan dalam DPA kegiatan dikali 100		Dispaperta



NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3	4	6	7
4.		Meningkatnya daya saing produk pertanian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	Kontribusi pertanian dibagi PDRB ADHB		Dispaperta
<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>						
1.		Terwujudnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah pelaku usaha/perusahaan yang sudah memiliki ijin lingkungan ( AMDAL/UKL-UPL)	Jumlah pelaku usaha / perusahaan yang sudah memiliki ijin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL)	Kabid Tata Lingkungan	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
2.		Terwujudnya air sungai yang bersih tidak tercemar	Jumlah sungai	Jumlah pengambilan uji sampel air dibagi jumlah sungai	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
3.		Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	Rasio Ruang Terbuka Hijau	Jumlah kawasan lindung dibagi jumlah ruang terbuka hijau	Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
4.		Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah	Jumlah penduduk per 1.000 dibagi jumlah bank sampah dikalikan 100%	Kabid Pengelolaan sampah dan limbah B3	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>
<i>Disparpora</i>						
1.		Peningkatan jumlah wisatawan	Meningkatnya jumlah wisatawan (nusantara/ asing) yang mengunjungi destinasi wisata di Kab. Batang	Jumlah wisatawan per tahun	Kabid Destinasi	<i>Disparpora</i>
2.		Obyek wisata yang ditangani	Jumlah obyek wisata yang dikelola dan dikembangkan	Jumlah obyek wisata yang dikelola selama 1 tahun	Kabid Destinasi	<i>Disparpora</i>
3.		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah retribusi obyek wisata yang dikelola oleh disparpora dalam 1 tahun	Kabid Destinasi	<i>Disparpora</i>
4.		Persentase pemuda berwirausaha	Peningkatan kemampuan dan	Jumlah pemuda yang sudah	Kabid	

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	sumberdata	Penanggung jawab	
1		2	3	4	6	7	
			pengetahuan pemuda	mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan berwirausaha	Pemasaran		
5.		Jumlah organisasi pemuda yang dibina	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	Jumlah organisasi pemuda yang dibina oleh disparpora dalam 1 tahun	Kabid PORA	<i>Disparpora</i>	
6.		Jumlah organisasi olahraga yang di bina	Jumlah organisasi olahraga yang di bina	Jumlah organisasi olahraga yang dibina oleh disparpora dalam 1 tahun	Kabid PORA	<i>Disparpora</i>	
7.		Jumlah kejuaraan pemuda dan olahraga di tingkat provinsi Jateng	Jumlah kejuaraan pemuda dan olahraga yang diikuti	Jumlah kejuaraan pemuda dan olahraga yang diikuti oleh disparpora selama 1 tahun	Kabid PORA	<i>Disparpora</i>	
<i>DPMPTSP dan Naker</i>							
1.		Meningkatnya minat untuk berinvestasi di Kabupaten Batang	1	Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Batang	Jumlah realisasi proyek investasi		<i>DPMPTSP dan Naker</i>
			2	Rasio kepeminatan investasi	Jumlah pendaftaran investasi		<i>DPMPTSP dan Naker</i>
			3	Jumlah penyerapan tenaga kerja	Rasio daya serap tenaga kerja		<i>DPMPTSP dan Naker</i>
			4	Rasio pelayanan perijinan	Jumlah perijinan yang diterbitkan dibagi jumlah pelayanan perijinan		<i>DPMPTSP dan Naker</i>
			5	Jumlah izin usaha yang diterbitkan	Jumlah izin yang diterbitkan berdasarkan register pendaftaran dan register izin		<i>DPMPTSP dan Naker</i>
			6	Jumlah dokumen kajian	Jumlah buku/ dokumen laporan		<i>DPMPTSP dan Naker</i>
2.		Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat pencari kerja	1	Tingkat kesempatan kerja	Jumlah penduduk bekerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100		<i>DPMPTSP dan Naker</i>
			2	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah penempatan tenaga kerja ditambah jumlah job kampasing		<i>DPMPTSP dan Naker</i>
3.		Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1	Tingkat wirausaha baru	Jumlah pemuda berwirausaha dibagi pencari kerja dikali 100		<i>DPMPTSP dan Naker</i>
			2	Rasio pemuda berwirausaha	Jumlah pemuda wirausaha baru		<i>DPMPTSP dan</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3		4	6	7
					dibagi jumlah peserta pendidikan dan pelatihan		<i>Naker</i>
			3	Angka sengketa pengusaha – pekerja per tahun	Jumlah permasalahan ketenagakerjaan (perselisihan antara pengusaha-pekerja terkait hak pekerja)		<i>DPMPTSP dan Naker</i>
4.		Meningkatnya penempatan penyelenggaraan transmigrasi	1	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah KK yang minat transmigrasi		<i>DPMPTSP dan Naker</i>
			2	Jumlah Warga	Jumlah warga yang bertransmigrasi		<i>DPMPTSP dan Naker</i>
			3	Jumlah KK dan anggota keluarga yang bertransmigrasi	Jumlah KK dan anggota keluarga yang bertransmigrasi sesuai kuota dari provinsi Jawa Tengah		<i>DPMPTSP dan Naker</i>
<i>Dinas Kesehatan</i>							
1.		Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian serta Peningkatan status Gizi Masyarakat	1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah kematian ibu hamil, bersalin, nifas dalam satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama dikali 100.000	Bidang Kesmas	<i>Dinas Kesehatan</i>
			2	Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah kematian anak usia kurang dari 1 tahun dalam satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama di kali 1.000	Bidang Kesmas	<i>Dinas Kesehatan</i>
			3	Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA)	Jumlah kematian anak usia kurang dari 5 tahun dalam satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama di kali 1.000	Bidang Kesmas	<i>Dinas Kesehatan</i>
			4	Angka kematian umum pasien yang dirawat di RSUD (Gross Death Rate/ GDR)	Jumlah pasien keluar mati dibagi jumlah pasien keluar (hidup + mati) kali 1.000		<i>Dinas Kesehatan</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	sumberdata	Penanggung jawab	
1		2	3	4	6	7	
			5	Angka pasien keluar yang meninggal >48 jam perawatan di RS ( Net Death Rate/ NDR	Jumlah pasien keluar mati >48 jam dibagi jumlah pasien keluar (hidup + mati) kali 1.000		Dinas Kesehatan
			4	Case Notification Rate (CNR) kasus baru TB	Jumlah seluaruh kasus baru TB dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100.000 penduduk		Dinas Kesehatan
			5	kesembuhan pengobatan TB Bakteri Tahan Asam (BTA) positif (Cure Rate / CR)	Jumlah penderita TB BTA + yang sembuh dibagi jumlah penderita TB BTA + yang diobati dikali 100		Dinas Kesehatan
			6	angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (Icidence Rate / IR DBD)	Jumlah kasus DBD yang ditemukan dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100.000		Dinas Kesehatan
			7	Angka penemuan kasus baru kusta (New Case Detection Rate / NCDR)	Jumlah kasus baru kusta yang ditemukan dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikalikan 100.000		Dinas Kesehatan
			8	angka kesakitan malaria (Annual Parasite Incidence / IR)	Jumlah penderita malaria positif yang ditemukan dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikalikan 100.000		Dinas Kesehatan
			9	prevalensi Balita Gizi Buruk	Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan (berat badan/tinggi badan) dibagi jumlah balita yang ada dikalikan 100		Dinas Kesehatan
DPU PR							
1.		Jalan dan jembatan kondisi baik		Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi pajang jalan kabupaten didaerah tersebut dikalikan 100%	Kabid prasarana jalan dan jembatan	DPU PR
2.		Jaringan irigasi dalam kondisi baik		Persentase irigasi kabupaten	Luas irigasi kabupaten dalam	Kabid Pengairan	DPU PR

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3		4	6	7
				dalam kondisi baik	kondisi baik dibagi luas irigasi kabupaten dikalikan 100%		
3.		Ruang terbuka hijau yang ditertibkan	1	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB	Luas ruang terbuka hijau dibagi luas wilayah ber HPL / HGB dikalikan 100%	Kabid Penataan Ruang	<i>DPU PR</i>
			2	Ketaatan terhadap RTRW	Realisasi RTRW dibagi rencana peruntukan dikali 100%	Kabid Penataan Ruang	<i>DPU PR</i>
			3	Luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	Luasan RTH publik yang tersedia diakhir tahun pencapaian SPM dibagi luas RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan dikalikan 100%	Kabid Penataan Ruang	<i>DPU PR</i>
<i>DPRKP</i>							
1		Meningkatkan jumlah rehabilitasi rumah tidak layak huni		Prosentase rehabilitasi rumah layak huni	Jumlah Rumah Layak Huni dibagi Jumlah rumah keseluruhan dikali 100%	Kabid Perumahan dan Pertanahan	<i>DPRKP</i>
2		Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi lingkungan		Persentase rumah tangga bersanitasi	Jumlah rumah tangga bersanitasi dibagi Jumlah seluruh rumah tangga dikali 100%	Kabid pemukiman	<i>DPRKP</i>
3		Meningkatnya sarana dan prasarana air bersih/ air minum		Persentase rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah rumah tangga pegguan air bersih dibagi jumlah seluruh rumah tangga dikalikan 100%	Kabid pemukiman	<i>DPRKP</i>
4		Menurunnya kawasan pemukiman kumuh perkotaan		Prosentase pemukiman kumuh	Luas lingkungan pemukiman kumuh dibagi jumlah luas wilayah dikalikan 100%	Kabid Perumahan dan Pertanahan	<i>DPRKP</i>
5		Terwujudnya penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1	Jumlah tanah pemda yang disertifikat	Tanah pemda yang bersertifikat tahun yang bersangkutan	Kabid Perumahan dan Pertanahan	<i>DPRKP</i>
			2	Prosentase penyelesaian kasus tanah	Jumlah kasus yang ditangani dibagi kasus tanah yang terdaftar dikalikan 100%	Kabid Perumahan dan Pertanahan	<i>DPRKP</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3		4	6	7
6		Terwujudnya sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	1	Prosentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik dibagi jumlah jalan lingkungan seluruhnya dikalikan 100%	Kabid Pemukiman	DPRKP
			2	Prosentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	Jumlah drainase lingkungan dalam kondisi baik dibagi jumlah drainase lingkungan seluruhnya dikalikan 100%	Kabid Pemukiman	DPRKP
7		Terwujudnya penataan dan pemeliharaan taman yang kondusif		Prosentase taman dalam kondisi baik	Jumlah taman yang tertata dibagi jumlah taman seluruhnya dikalikan 100%	Kabid Pemukiman	DPRKP
<i>Disdukcapil</i>							
1.		Terwujudnya pengendalian penduduk dan administrasi kependudukan yang menyeluruh	1	Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	Jumlah penduduk usia >17 yang telah ber KTP dibagi jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah		<i>Disdukcapil</i>
			2	Rasio bayi ber-akta kelahiran	Jumlah bayi berakte kelahiran dibagi jumlah bayi		<i>Disdukcapil</i>
			3	Rasio pasangan ber-akta nikah	Jumlah pasangan nkah berakte nikah dibagi jumlah keseluruhan pasangan nikah		<i>Disdukcapil</i>
			4	Rasio akta kematian	Jumlah kematian yang sudah mempunyai akte kematian dibagi jumlah seluruh kematian		<i>Disdukcapil</i>
			5	Kepemilikan KTP	Jumlah penduduk diatas 17 atau sudah menikah yang memiliki KTP		<i>Disdukcapil</i>
<i>Diskominfo</i>							
1		Meningkatnya pelayanan publik bagi masyarakat Batang	1	Jumlah jaringan komunikasi	Jumlah jaringan komunikasi	Kabid Penyelenggara n E-Government	<i>Diskominfo</i>
			2	Website milik pemerintah	Jumlah website OPD	Kabid	<i>Diskominfo</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3	4	6	7
			daerah		Penyelenggara n E- Government	
			3 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	Jumlah KIM	Kabid layanan informasi dan statistik	<i>Diskominfo</i>
			4 Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi	Jumlah distribusi informasi per bulan	Kabid IKP	<i>Diskominfo</i>
			5 Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media online seperti website dan media lainnya	Jumlah distribusi informasi per bulan	Kabid IKP	<i>Diskominfo</i>
			6 Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat	Jumlah distribusi informasi per bulan	Kabid IKP	<i>Diskominfo</i>
			7 Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah / diskusi dan lokakarya	Jumlah distribusi informasi per bulan	Kabid IKP	<i>Diskominfo</i>
			8 Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti media bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho	Jumlah distribusi informasi per bulan	Kabid IKP	<i>Diskominfo</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3		4	6	7
			9	Jumlah penyiaran radio / TV lokal	Jumlah penyiaran radio	Kabid IKP	<i>Diskominfo</i>
2.		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1	Jumlah sistem unggulan dalam smart city	Jumlah sistem informasi smart city	Kabid penyelenggaraan E- Government	<i>Diskominfo</i>
			2	Jumlah Desa yang menerapkan Smart Village	Jumlah desa yang menerapkan smart village	Kabid penyelenggaraan E- Government	<i>Diskominfo</i>
			3	Keberhasilan pengiriman dan penerimaan dokumen elektronik melalui VPN	Persentase keberhasilan VPN	Kabid penyelenggaraan E- Government	<i>Diskominfo</i>
			4	Penyelenggaraan jaringan Komunikasi sandi	Persentase penyelenggaraan jaringan Komunikasi sandi	Kabid penyelenggaraan E- Government	<i>Diskominfo</i>
3		Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan, penanggaran dan pelaksanaan	1	Buku kabupaten Batang Dalam Angka	Ada/tidak	Kabid layanan informasi dan statistik	<i>Diskominfo</i>
			2	Buku Kecamatan di wilayah Kabupaten Batang Dalam Angka	Ada/tidak	Kabid layanan informasi dan statistik	<i>Diskominfo</i>
			3	Single Data Sistem	Ada/tidak	Kabid layanan informasi dan statistik	<i>Diskominfo</i>
			4	Buku PDRB dan IHK	Ada/tidak	Kabid layanan informasi dan statistik	<i>Diskominfo</i>
			5	Buku NTP dan Distrbusi Pendapatan	Ada/tidak	Kabid layanan informasi dan statistik	<i>Diskominfo</i>
			6	Info Grafis Kabupaten dalam Angka	Ada/tidak	Kabid layanan informasi dan statistik	<i>Diskominfo</i>



NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	sumberdata	Penanggung jawab	
1		2	3	4	6	7	
<i>Dislutkanak</i>							
1		Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan	1	Prosentase penyerapan anggaran pada program Non urusan	Realisasi penyerapan anggaran dibagi pagu anggaran dikaliakn 100%	Sekretariat	<i>Dislutkanak</i>
2.		Terlaksananya sosialisasi, pendampingan usaha dan akses permodalan pada usaha pemasaran produk perikanan dan peternakan guna meningkatkan usaha dan kesejahteraan masyarakat kelautan perikanan dan peternakan		Tingkat konsumsi Ikan (kg/kapita/th)	Jumlah konsumsi ikan (kg) dibagi target konsumsi ikan daerah dikalikan 100%		<i>Dislutkanak</i>
			2	Konsumsi Protein (gr/kapita/hr):		Kabid Peternakan	<i>Dislutkanak</i>
				- Daging			
				- Telur			
		- susu					
3.		Terselenggaranya bantuan sarpras dan pembinaan/ pelatihan peningkatan ketrampilan kapasitas SDM pelaku usaha kelautan perikanan dan peternakan	1	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap per tahun	Kabid Perikanan tangkap	<i>Dislutkanak</i>
			2	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya per tahun	Kabid Perikanan Tangkap	<i>Dislutkanak</i>
4.		Tersedianya SDM dan sarpras pendukung pelayanan kesehatan hewan untuk meningkatkan ketersediaan pangan segar		Produksi hasil Ternak :		Kabid Peternakan	<i>Dislutkanak</i>
				-Daging (kg)	Jumlah produksi hasil ternak (daging) per tahun		<i>Dislutkanak</i>
				-Susu (liter)	Jumlah produksi hasil ternak (susu) per tahun		<i>Dislutkanak</i>
				-Telur (kg)	Jumlah produksi hasil ternak (telur) per tahun		<i>Dislutkanak</i>
<i>Dinas Sosial</i>							
1.		Meningkatnya pelayanan sosial guna menekan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	1	PMKS yang berhasil direhabilitasi	PMKS yang berhasil direhabilitasi/PMKS yang direhabilitasi dikali 100%		<i>Dinas Sosial</i>
			2	PMKS yang berhasil diberikan perlindungan dan jaminan sosial	PMKS yang berhasil diberikan perlindungan dan jaminan sosial/PMKS yang seharusnya diberikan perlindungan dan jaminan sosial dikali 100%		<i>Dinas Sosial</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3		4	6	7
			3	Rasio Rumah Tangga Miskin yang mengikuti Program penanggulangan kemiskinan	Rumah Tangga Miskin yang mengikuti Program penanggulangan kemiskinan/PMKS yang seharusnya diberikan perlindungan dan jaminan sosial dikali 100%		Dinas Sosial
2.		Meningkatnya peran serta seluruh masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial		Rasio PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos	PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos/PSKS yang seharusnya aktif dalam pembangunan Kesos dikali 100%		Dinas Sosial
<i>Bapelitbang</i>							
1.		Tercapainya sasaran pembangunan daerah		Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	Capaian pembangunan bidang Sosbud, Ekonomi, dan IPW dibagi target capaian pembangunan RPJMD dikalikan 100%	Bidang Sosbud, Ekonomi, dan IPW	<i>Bapelitbang</i>
2.		Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran daerah	1	Persentase kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	Jumlah kegiatan yang ada di RKPD tahun N dibagi jumlah kegiatan yang ada di DPA tahun N dikalikan 100%		<i>Bapelitbang</i>
			2	Persentase penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah	Data dan informasi yang tersedia dalam perencanaan pembangunan dibagi data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan dikalikan 100%		<i>Bapelitbang</i>
3		Meningkatnya perencanaan partisipatif yang responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat		Persentase peran serta masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	Jumlah masyarakat yang hadir dalam musrenbang dibagi jumlah masyarakat yang diundang dalam musrenbang dikalikan 100%	Bidang Perencanaan	<i>Bapelitbang</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3	4	6	7
4		Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi perencanaan dan kelitbangan daerah	Nilai SAKIP Bapelitbang	Hasil penilaian terhadap SAKIP oleh Inspektorat daerah		Bapelitbang
5		Meningkatnya Inovasi dalam berbagai sektor	Prosentase OPD Inovatif	Jumlah OPD inovatif dibagi jumlah OPD yang ada dikalikan 100%	Bidang Litbang	Bapelitbang
6		Meningkatnya peran serta masyarakat/ stakeholder dalam kegiatan kelitbangan daerah	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan pemerintah daerah	Jumlah hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan pemerintah daerah dibagi hasil kelitbangan yang ada dikalikan 100%	Bidang Litbang	Bapelitbang
<i>BPKPAD</i>						
1.		Peningkatan jumlah wajib pajak	Persentase peningkatan jumlah wajib pajak	Jumlah wajib pajak tahun N dikurangi jumlah wajib pajak tahun N-1 dibagi jumlah wajib pajak tahun N-1 dikalikan 100%	Bidang Administrasi PAD	<i>BPKPAD</i>
2.		Penyusunan APBD tepat waktu	Tersusunnya APBD sesuai jadwal	APBD ditetapkan dibagi jadwal penetapan APBD dikalikan 100%	Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan	<i>BPKPAD</i>
3.		Peningkatan baku PBB	Persentase peningkatan baku PBB	Baku PBB akhir dikurangi baku PBB awal dibagi baku PBB awal dikalikan 100%	Bidang Administrasi PAD	<i>BPKPAD</i>
4.		Pemanfaatan teknologi informasi secara efektif dan efisien	Persentase OPD yang menggunakan teknologi informasi	Jumlah OPD memanfaatkan SIMDA dibagi jumlah OPD dikalikan 100%	Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan	<i>BPKPAD</i>
5.		Desa lunas PBB tepat waktu	Persentase desa lunas PBB tepat waktu	Jumlah desa lunas PBB dibagi jumlah desa dikalikan 100%	Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan PEP	<i>BPKPAD</i>
6.		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	PAD tahun N dikurangi PAD tahun N-1 dibagi PAD tahun N-	Bidang Penagihan,	<i>BPKPAD</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3	4	6	7
				1 dikalikan 100%	Evaluasi dan Pelaporan PEP	
7.		Tertibnya pencatatan barang milik daerah	Persentase perangkat daerah yang melaporkan BMD tepat waktu dan tepat mutu	Jumlah PD kirim lap BMD tepat waktu dibagi jumlah PD dikalikan 100%	Bidang aset daerah	<i>BPKPAD</i>
8		Realisasi penerbitan SP2D terhadap anggaran kas triwulan	Persentase realisasi penerbitan SP2D terhadap anggaran kas triwulan	SP2D terbit dibagi anggaran kas triwulan dikalikan 100%	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	<i>BPKPAD</i>
9.		Laporan keuangan pemerintah daerah tepat waktu	Pelaporan keuangan daerah tepat waktu	Laporan keuangan dikirim dibagi batas akhir pengiriman laporan keuangan dikalikan 100%	Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan	<i>BPKPAD</i>
<i>BKD</i>						
1.		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	1	Prosentase akurasi data kepegawaian	Jumlah realisasi perubahan data dibagi jumlah perubahan data kepegawaian dikali 100%	<i>BKD</i>
			2	Prosentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	Jumlah realisasi SK KP dibagi jumlah usulan SK KP ke BKN dikali 100%	<i>BKD</i>
			3	jumlah penyelesaian usulan pensiun pegawai tepat waktu	Jumlah realisasi SK Pensiun tepat waktu tahun N	<i>BKD</i>
			4	Prosentase tertibnya arsip data kepegawaian	Jumlah arsip perubahan data kepegawaian yang diterima dibagi jumlah realisasi perubahan data kepegawaian tahun berjalan kali 100%	<i>BKD</i>
			5	Jumlah peserta yang lolos STTD	Jumlah peserta yang lolos seleksi STTD dibagi tahun N	<i>BKD</i>
			6	Jumlah usulan formasi yang ditetapkan kemenpan RB	Jumlah formasi yang disetujui Kempan RB tahun N	<i>BKD</i>
2.		Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan kompeten sesuai bidang tugasnya serta	1	Prosentase penurunan kasus pelanggaran disiplin ASN	Jumlah pelanggaran disiplin ASN tahun berjalan dibagi jumlah pelanggaran disiplin	<i>BKD</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3		4	6	7
		meningkatnya kedisiplinan ASN			ASN tahun lalu dikali 100%		
			2	Jumlah pejabat struktural yang mengikuti Diklatpim	Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklatpim tahun N		BKD
			3	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis tahun N		BKD
			4	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti diklat fungsional tahun N		BKD
			5	Jumlah ASN yang mengikuti tes kompetensi	Jumlah ASN yang mengikuti tes kompetensi tahun N		BKD
<i>Kesbangpol</i>							
1		Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	1	Persentase pembinaan terhadap elemen masyarakat tentang wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat penerima wasbang dibagi per 1000 elemen masyarakat dikali 100%		<i>Kesbangpol</i>
2		Meningkatnya kualitas pendidikan politik dan bantuan partai politik	2	Persentase partai politik yang patuh dengan tata cara penggunaan bantuan keuangan parpol	Jumlah parpol yang menerima bantuan dibagi jumlah parpol yang tertib administrasi dikalikan 100%		<i>Kesbangpol</i>
			3	Persentase pembinaan terhadap elemen masyarakat tentang pendidikan politik dan negeri	Jumlah peserta yang paham pendidikan politik dibagi jumlah peserta sosialisasi pendidikan politik dikalikan 100%		<i>Kesbangpol</i>
<i>BPBD</i>							
1.		Persentase Daerah Rawan Bencana	1	Penurunan jumlah desa / kelurahan rawan bencana	Jumlah desa dan kelurahan rawan bencana di bagi jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Batang		<i>BPBD</i>
			2	Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana	Jumlah relawan di bagi jumlah wilayah rawan bencana		<i>BPBD</i>
			3	Pemasangan rambu bencana dan jalur evakuasi	Keadaan wilayah dan jenis bencana		<i>BPBD</i>
			4	Pelatihan Relawan PB untuk penanganan masyarakat rentan	Jumlah relawan terlatih dibagi jumlah relawan yang ada		<i>BPBD</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3	4	6	7
2.		Persentase ketersediaan peta resiko bencana	Fasilitasi Kegiatan Kajian Resiko Bencana Kab. Batang	Jumlah peta resiko dibagi peta resiko bencana di Kabupaten Batang		BPBD
<i>Dispermades</i>						
1		Meningkatnya jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Jumlah kelompok binaan LPM dibagi jumlah LPM	Kabid kelembagaan adat dan sosbud	<i>Dispermades</i>
2		Meningkatnya jumlah kelompok binaan PKK	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Jumlah kelompok binaan PKK dibagi jumlah PKK	Kabid kelembagaan adat dan sosbud	<i>Dispermades</i>
3		Meningkatnya jumlah LPM berprestasi	LPM berprestasi	Jumlah LPM berprestasi dibagi jumlah LPM dikalikan 100%	Kabid kelembagaan adat dan sosbud	<i>Dispermades</i>
4		Meningkatnya jumlah PKK aktif	PKK aktif	Jumlah PKK aktif dibagi jumlah PKK dikalikan 100%	Kabid kelembagaan adat dan sosbud	<i>Dispermades</i>
5		Meningkatnya jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Jumlah swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat dibagi total program pemberdayaan masyarakat dikalikan 100%	Kabid pemberdayaan desa dan kelurahan	<i>Dispermades</i>
6		Meningkatnya kapasitas aparatur pemdes/ kelurahan	Kapasita aparatur pemdes/ kelurahan	Jumlah aparatur pemdes/ kelurahan yang telah mengikuti pelatihan dibagi jumlah aparatur desa yang ada dikalikan 100%	Kabid pemberdayaan desa dan kelurahan	<i>Dispermades</i>
7		Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak	posyandu aktif	Jumlah balita aktif di kegiatan posyandu	Kabid kelembagaan adat dan sosbud	<i>Dispermades</i>
<i>Disperindagkop dan UKM</i>						
1		Meningkatkan Aktivitas ekonomi, melalui peningkatan kualitas Koperasi dan UKM	1 Prosentase Koperasi Aktif	Jumlah koperasi yang menjalankan usahanya sesuai aturan dibagi jumlah koperasi		<i>Disperindagkop dan UKM</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	sumberdata	Penanggung jawab	
1		2	3	4	6	7	
				yang ada di Kabupaten Batang dikalikan 100%			
			2	Prosentase jumlah Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa dibagi jumlah koperasi yang ada di Kab. Batang dikalikan 100%		<i>Disperindagkop dan UKM</i>
			3	Prosentase Penilaian Kesehatan KSP/USP	Jumlah Koperasi yang dinilai dibagi Jumlah Koperasi yang wajib dinilai dikalikan 100%		<i>Disperindagkop dan UKM</i>
			4	Prosentase Pendidikan dan latihan Perkoperasian	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan pelatihan dibagi jumlah koperasi yang ada dikalikan 100%		<i>Disperindagkop dan UKM</i>
			5	Prosentase Produk OVOP	jumlah produk OVOP yang ada dibagi target Ovop kali 100%		<i>Disperindagkop dan UKM</i>
			6	Prosentase Pertumbuhan Usaha Mikro kecil	Jumlah usaha mikro s/d tahun (n) dikurangi jumlah industri tahun (n-1) yang dibagi Jumlah Industri tahun (n-1) kali 100%		<i>Disperindagkop dan UKM</i>
			7	Prosentase wira usaha baru	Jumlah Wira Usaha baru yang memproduksi/berkembang dibagi jumlah wira usaha yang dibina kali 100%		<i>Disperindagkop dan UKM</i>
2		Meningkaktan Kualitas Pelayanan dan mewujudkan Pasar yang baik dan repreneurstatif (Bersih dan tertata)	1	Prosentase Revitalisasi Pasar Rakyat	Prosentase jumlah Pasar rakyat yang direvitalisasi dibagi keseluruhan pasar rakyat yang ada dikalikan 100%		<i>Disperindagkop dan UKM</i>
			2	Prosentase capaian target Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Pelayanan Pasar	Jumlah Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun (n) dibagi Jumlah target Retribusi Pelayanan Pasar Tahun (n) Kali 100%		<i>Disperindagkop dan UKM</i>
			3	Prosentase PKL yang ditata dan	Jumlah PKL yang direlokasi		<i>Disperindagkop</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3	4	6	7
			direlokasi	dibagi jumlah PKL yang ada x 100%		dan UKM
3		Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat, melalui pemantauan Pengawasan Peredaran Barang dan Mengoptimalkan Perlindungan Terhadap Konsumen	1	Prosentase Tingkat Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	Nilai ekspor bersih th (n) dikurangi jumlah nilai ekspor tahun (n-1) dibagi nilai ekspor bersih tahun (n-1) kali 100%	Disperindagkop dan UKM
			2	Prosentase Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran	Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran Tahun (n) dibagi jumlah UMKM yang mengikuti pembinaan Tahun (n) kali 100%	Disperindagkop dan UKM
			3	Prosentase Rata-rata Ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya	Rata-rata ketersediaan sembako dan barang penting lainnya Tahun (n) dikurangi rata-rata ketersediaan sembako dan barang penting lainnya Tahun (n-1) dibagi Rata rata ketersediaan sembako dan barang penting lainnya Tahun (n-1) kali 100%	Disperindagkop dan UKM
			4	Prosentase Peningkatan Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera sah	Jumlah UTTP bertanda tera sah tahun (n) dikurangi Jumlah UTTP bertanda tera sah tahun (n-1) dibagi Jumlah UTTP bertanda tera sah tahun(n-1) Kali 100%	Disperindagkop dan UKM
			5	Prosentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHK)	Jumlah PDRB Sektor Perdagangan Terhadap PDRB(ADHK) dibagi Jumlah Total PDRB kali seratus persen	Disperindagkop dan UKM
			6	Prosentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	Jumlah PDRB Sektor Perdagangan Terhadap PDRB(ADHB) dibagi Jumlah Total PDRB kali seratus persen	Disperindagkop dan UKM



NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	sumberdata	Penanggung jawab	
1		2	3	4	6	7	
4		Meningkatkan aktivitas ekonomi melalui pelayanan di bidang industri	1	Prosentase pertumbuhan industri	Jumlah Industri non formal s/d Tahun (n) dikurangi Jumlah Industri non formal s.d th (n-1) dikalikan 100% dibagi jumlah industri Non Formal s.d Tahun (n-1)		<i>Disperindagkop dan UKM</i>
			2	Prosentase Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB (ADHK)	Jumlah Industri s/d th n dikurangi jumlah industri tahun n-1 dibagi jumlah industri tahun n dikalikan 100%		<i>Disperindagkop dan UKM</i>
			3	Prosentase Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB (ADHB)	Jumlah PDRB Sektor Industri Terhadap PDRB(ADHB) dibagi Jumlah Total PDRB kali seratus persen		<i>Disperindagkop dan UKM</i>
			4	Prosentase Wira usaha baru yang mengikuti pelatihan	Jumlah calon wira usaha baru yang mengikuti pembinaan dibagi jumlah wira usaha baru yang mendaftar kali 100%		<i>Disperindagkop dan UKM</i>
	Dishub						
1		Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman, dan lancar	1	Persentase angkutan umum yang laik jalan	Jumlah kendaraan lulus uji dibagi jumlah KBWU dikalikan 100%		<i>Dishub</i>
			2	Persentase menurunnya tingkat pelanggaran tahun sekarang dikurangi jumlah	pelanggaran tahun sebelumnya dibagi jumlah pelanggaran sebelumnya dikalikan 100%		<i>Dishub</i>
			3	Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan di jalan protokol pada jam sibuk	Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan = jumlah kecepatan rata-rata dibagi n		<i>Dishub</i>
			4	Rasio panjang jalan	Jumlah panjang jalan dibagi jumlah kendaraan dikalikan 100%		<i>Dishub</i>
			5	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi	Jumlah penumpang puas/jumlah total penumpang dikalikan 100%		<i>Dishub</i>

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Perhitungan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3		4	6	7
2		Meningkatnya keselamatan lalu lintas		Persentase penurunan angka kecelakaan	Jumlah kecelakaan tahun sekarang dikurangi jumlah kecelakaan tahun sebelumnya dibagi jumlah kecelakaan tahun sebelumnya dikalikan 100%		Dishub
Disperpuska							
1		Meningkatkan dan mengembangkan jumlah koleksi bahan pustaka perpustakaan serta dokumen / arsip yang bernilai guna	1	Meningkatkan dan mengembangkan jumlah koleksi bahan pustaka perpustakaan serta dokumen / arsip yang bernilai guna	Jumlah koleksi buku pada perpustakaan daerah		Disperpuska
			2	Meningkatkan dan mengembangkan dokumen/ arsip bernilai guna	Menunjukkan jumlah arsip hasil kegiatan akuisisi kearsipan		Disperpuska
			3	Jumlah arsip bernilai guna meningkat	Menunjukkan peningkatan jumlah arsip yang tersimpan pada LKD		
2		Mengembangkan dan memperluas jasa layanan perpustakaan dan informasi serta pemanfaatan dokumen / arsip daam rangka pembelajaran sepanjang hayat bagi seluruh masyarakat dan peran serta masyarakat	1	Jumlah titik layanan bertambah	Jumlah perpustakaan yang dilayani		Disperpuska
			2	Peran serta masyarakat dalam melestarikan arsip/ dokumen	Jumlah arsip masyarakat yang diserahkan pada LKD		Disperpuska
			3	Jumlah pemustaka berdasar sekolah/ gender	Jumlah anggota perpustakaan berdasarkan jenis kelamin		Disperpuska
			4	Jumlah bahan pustaka yang dipinjam	Jumlah buku perpustakaan yang dipinjam oleh pemustaka		Disperpuska
			5	Jumlah judul yang dipinjam	Jumlah judul buku yang dipinjam oleh pemustaka		Disperpuska
3		Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan staf perpustakaan dan kearsipan dalam bidang teknologi informasi	1	Peningkatan jumlah perpustakaan yang menggunakan sistem otomisasi layanan	Jumlah perpustakaan yang menggunakan sistem otomasi perpustakaan		Disperpuska
			2	Peningkatan kemampuan SDM pengelola perpustakaan dan	Jumlah SDM perpustakaan yang telah mengikuti bimtek		Disperpuska

NO	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	sumberdata	Penanggung jawab
1		2	3	4	6	7
			kearsipan	perpustakaan dan kearsipan		
4		Meningkatkan sarana dan prasarana jasa layanan perpustakaan, informasi, dan arsip	1 Pemanfaatan teknologi informasi/ otomasi pengelolaan berbagai jenis perpustakaan	Jumlah teknologi informasi/ otomasi perpustakaan yang dipergunakan		<i>Disperpuska</i>
			2 Akses arsip/ dokumen secara cepat	Menunjukkan kecepatan dalam temu balik arsip		<i>Disperpuska</i>
			3 Penerapan sistem otomasi dalam temu kembali arsip/ dokumen	Jumlah unit pencipta yang menggunakan otomasi kearsipan		<i>Disperpuska</i>
5		Meningkatkan peran pemerintah dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mesyarakat untuk gemar membaca dan pelestarian arsip sebagai khasanah bangsa	1 Layanan prima perpustakaan dan peningkatan kualitas jasa layanan	Menunjukkan survey kepuasan pengunjung		<i>Disperpuska</i>
			2 Jumlah masyarakat yang memanfaatkan arsip/ dokumen meningkat	Jumlah kunjungan masyarakat pada LKD		<i>Disperpuska</i>
<i>Kecamatan</i>						
1.		Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (mudah , cepat dan memuaskan)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM terhadap pelayanan masyarakat		<i>Kecamatan</i>
2.		Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah Kasus Pencurian	Jumlah kasus pencurian per tahun		<i>Kecamatan</i>
3.		Meningkatkan peran masyarakat dalam bidang ekonomi produktif	Jumlah Keluarga Prasejahtera	Jumlah keluarga miskin pra sejahtera per tahun		<i>Kecamatan</i>

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI